

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era saat ini keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia pemerintahan. Adanya tuntutan dari masyarakat yang menginginkan terlaksananya pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan kebijakan sistem pemerintahan yang bertanggungjawab secara sah dan terukur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah dituntut untuk melaksanakan program dan kebijakannya dengan transparan, efektif dan efisien sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Sistem akuntansi yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku akan mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga setiap instansi pemerintah dapat mengelola anggarannya secara transparan, efektif, efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saat ini banyak sekali terjadi fenomena yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga hal ini menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap kebijakan yang dilaksanakan menurun. Salah satunya yang terjadi di Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditemukan beberapa kasus yang terjadi pada Dinas Sosial baik di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021, ditemukan 57 kasus yang terjadi berhubungan dengan penyelewengan penyaluran program bantuan sosial, yang terdiri dari 45 kasus bantuan sosial tidak tepat sasaran, 4 kasus pemotongan bantuan sosial, sedangkan kasus yang lain berupa penggelapan, penyaluran ganda dan transparansi data. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sebaran kasus

terkait bantuan sosial meliputi 35 kasus ditemukan di Kabupaten Bantul, 4 kasus ditemukan di Kota Yogyakarta, 7 kasus ditemukan di Kabupaten Sleman, 7 kasus ditemukan di Kabupaten Gunungkidul, 1 kasus ditemukan di Kabupaten Kulonprogo, dan 3 kasus ditemukan di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga diduga ditemukan sejumlah kasus *inclusion error* atau warga yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima bantuan sosial justru menerima bantuan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh tiga hal yaitu perbedaan metode pendataan, persoalan tata kelola penyaluran, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak diperbaharui secara berkala. Diduga data terpadu kesejahteraan sosial yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial adalah data tahun 2015. Selain itu, belum semua pegawai pada Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta memahami kejelasan tujuan anggaran Dinas Sosial. Hal ini menyebabkan pegawai Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta kurang tepat dalam menggunakan anggaran instansi untuk mencapai tujuan instansi yang telah ditetapkan. Kemudian, Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta kurang memperhatikan perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat dalam penentuan kegiatan atau program yang dilaksanakan. Sehingga, penggunaan anggaran yang semula bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Salah satu prinsip dari penerapan *good governance* adalah akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi organisasi secara terstruktur dengan

sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui program laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun oleh suatu instansi secara periodik”.

Dengan demikian, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan yang disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang digunakan sebagai salah satu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang *good governance*. Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Maka, dukungan masyarakat dan peran aktif dari seluruh lembaga pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran yaitu terkait seberapa jauh tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas agar anggaran dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang memiliki tanggungjawab atas tercapainya anggaran tersebut. Bagi pemerintah, anggaran digunakan sebagai alat untuk merancang kebijakan yang akan dilakukan dan dapat dilaksanakan pada periode tertentu secara terstruktur serta dapat terkontrol dengan baik. Anggaran dapat dilihat sebagai gambaran terkait dengan keadaan atau kondisi keuangan dari suatu instansi yang meliputi informasi aktivitas instansi seperti pendapatan, belanja, dan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu instansi dimasa yang akan datang. Kinerja pemerintah dinilai berdasarkan kesesuaian capaian kinerja dengan anggaran yang telah ditetapkan, maka dalam suatu instansi diperlukan penyusunan

anggaran yang jelas dan spesifik yang nantinya akan terlihat apakah anggaran sudah direalisasikan secara efektif dan efisien. Kejelasan sasaran anggaran dibutuhkan dalam membantu mencapai target kinerja yang sebelumnya sudah ditetapkan yang berhubungan dengan penggunaan anggaran.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:

“suatu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keadaan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Untuk mengurangi tingkat terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai maka pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat. Maka dengan dilaksanakannya sistem pengendalian internal secara optimal dalam suatu instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem pelaporan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014, pelaporan kinerja merupakan laporan atas penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan oleh setiap instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu bentuk akuntabilitas. Sistem pelaporan dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan kinerja instansi pemerintah terkait dengan implementasi anggaran yang sebelumnya sudah ditetapkan. Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan yang berupa laporan keuangan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang akan ditetapkan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Harianto, dkk (2021) di Kabupaten Rokan Hilir, kesimpulan yang diperoleh bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafzhan (2021) yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, kesimpulan yang diperoleh bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan, sasaran anggaran dan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada penelitian Aprilianti, dkk (2020) di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan, kesimpulan yang diperoleh bahwa pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Bernadine (2018) yang dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten kesimpulan yang diperoleh bahwa anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Chandra (2021) pada instansi pemerintah Kabupaten Muara Enim diperoleh kesimpulan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan, sistem pengendalian internal, dan

kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali variabel-variabel dari penelitian terdahulu terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah namun dilakukan pada subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah wajib untuk melaporkan pelaksanaan kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Penyelewengan penyaluran bantuan sosial yang terjadi di Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu fenomena yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial. Pada tahun 2021, ditemukan 57 kasus yang terjadi berhubungan dengan penyelewengan penyaluran program bantuan sosial, yang terdiri dari 45 kasus bantuan sosial tidak tepat sasaran, 4 kasus pemotongan bantuan sosial, sedangkan kasus yang lain berupa penggelapan, penyaluran ganda dan transparansi data. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sebaran kasus terkait bantuan sosial meliputi 35 kasus ditemukan di Kabupaten Bantul, 4 kasus ditemukan di Kota Yogyakarta, 7 kasus ditemukan di Kabupaten Sleman, 7 kasus ditemukan di Kabupaten Gunungkidul, 1 kasus ditemukan di Kabupaten Kulonprogo, dan 3 kasus ditemukan di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menuntut Dinas Sosial untuk

segera memperbaiki sistem akuntabilitas kinerjanya agar masyarakat tidak dirugikan. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membantu Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta menyelesaikan permasalahan terkait ditemukannya penyelewengan penyaluran bantuan sosial. Alasan peneliti menggunakan Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai subjek penelitian untuk memperluas cakupan lokasi subjek penelitian karena terjadi kasus yang sama di beberapa Dinas Sosial di Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan pada instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini

diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan konsep penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Manfaat praktik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penentuan kebijakan dan ketepatan sasaran dana bantuan sosial sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu dalam perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan dengan penerapan ketiga variabel independen dalam penelitian ini sehingga mampu mencegah terjadinya permasalahan ketidaktepatan dana bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya data penerima bantuan sosial yang tidak diperbaharui.

